

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemimpinan merupakan fenomena universal yang terdapat dalam seluruh aspek kehidupan manusia yang diwujudkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kehidupan dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Kepemimpinan Kepala Kampung mempunyai peran besar dalam menentukan arah kebijakan dalam pembangunan di kampung. Kepala Kampung menjalankan hak, wewenang dan kewajiban, mengatur dan mengurus rumah tangga desa serta penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kepala Kampung dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa sebagai unsur staf dan kepala dusun sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Kampung dalam wilayah kerja tertentu. Peranan pemimpin, dipengaruhi oleh elemen lingkungan dan situasional dimana kepemimpinan berlangsung, terutama perangkat nilai budaya yang menjiwai kehidupan organisasi dan masyarakat dalam segala kegiatannya.

Pemahaman partisipasi masyarakat seringkali mempunyai pengertian sebagai dukungan yang harus diberikan oleh masyarakat pada suatu keputusan pemerintah. Sehingga ukuran yang dipakai adalah sejauh mana masyarakat menanggapi, melaksanakan dan mau mengikuti kehendak pemerintah tersebut, sehingga lebih bersifat top down. Apabila masyarakat tidak patuh dan mendukung sepenuhnya program dari pemerintah, maka masyarakat akan dianggap sebagai tidak partisipasi. Dalam pandangan ini sebenarnya

masyarakat lebih dilihat sebagai obyek pembangunan, Padahal partisipasi masyarakat itu merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.

Kepala Kampung bersama-sama dengan masyarakat berwenang mengatur dan mengukur kepentingan masyarakat sesuai dengan kesatuan hak masyarakat itu sendiri. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tersebut, Kepala Kampung dapat menggerakkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban Kepala Kampung. Kepala Kampung harus mampu memposisikan dirinya, dan tidak ada alasan untuk mengatakan tidak mampu atau alasan-alasan lainnya. Keadaan inilah yang terkadang kurang dipahami oleh seorang Kepala Kampung sehingga antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang dihadapi tidak pernah bersentuhan, dengan kata lain antara ketentuan dengan rasa ego yang saling berhadapan.

Kampung Tablasupa merupakan suatu desa yang terletak di Kabupaten Jayapura. Keadaan yang terjadi di Kampung Tablasupa Kabupaten Jayapura pada saat ini dimana peran Kepala Kampung dalam bidang pembangunan kurang terwujud secara baik, kurangnya pengkoordinasian Kepala Kampung terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di kampung tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun beberapa bentuk pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Tablasupa Jayapura Kabupaten Jayapura dari hasil swadaya masyarakat, kas desa, dan bantuan pemerintah daerah.

Kepala Kampung sebagai integrator kurang dapat membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berdialog mengenai persoalan

pembangunan desa. Kurangnya hubungan Kepala Kampung secara persuasif dengan seluruh masyarakat di desa. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya proses komunikasi antara Kepala Kampung dengan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kampung Tablasupa, yang bisa terlihat dari beberapa fenomena, yaitu:

1. Kepala Kampung Kurang pendekatan terhadap masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan.
2. Masyarakat masih enggan untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan, karena kurangnya pengaruh kebijakan dari Kepala Kampung.
3. Kurangnya masyarakat desa dalam menghadiri musyawarah desa untuk membicarakan persoalan mengenai pembangunan desa.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan yang telah ada.

Dari gambaran permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Kepemimpinan Kepala Kampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi Pembangunan di Kampung Tablasupa Kabupaten Jayapura).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan terkait penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kepemimpinan kepala Kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kampung Tablasupa Kabupaten Jayapura ?

2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat kepemimpinan Kepala Kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kampung Tablasupa Kabupaten Jayapura ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran kepemimpinan kepala Kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kampung Tablasupa Kabupaten Jayapura.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi penghambat kepemimpinan Kepala Kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kampung Tablasupa Kabupaten Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang diterima penulis selama menjadi mahasiswa ilmu pemerintahan Uncen Jayapura. Selain itu, dengan penelitian ini penulis mampu menganalisis tentang pengaruh kepemimpinan Kepala Kampung terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat

bagi pemerintah Kampung Tablasupa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

3. Secara metodologis, diharapkan dari penelitian ini bisa menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan maupun kajian yang sama namun lebih mendetail pelaksanaannya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan secara etimologi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “Mimpin” dengan menambah awalan “Pe” menjadi “Pemimpin” yang berarti menuntun, menunjukkan jalan dan membimbing. Seorang pemimpin seharusnya membimbing bawahannya untuk bekerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan secara empiris merupakan proses yang berisi rangkaian kegiatan yang saling mempengaruhi, berkesinambungan, dan terarah pada suatu tujuan. Rangkaian-rangkain itu berwujud kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan, memimpin serta terarah pada tujuan yang telah di sepakati bersama. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi antar pribadi atau kelompok, dalam situasi tertentu dan melalui komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin merupakan pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk suatu tujuan.

a. Pengertian Kepemimpinan

Dalam suatu instansi, kepemimpinan merupakan suatu faktor yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan suatu instansi, dengan kepemimpinan yang baik, proses manajemen akan berjalan lancar dan pegawai bergairah melaksanakan tugas-tugasnya. Gairah kerja, produktivitas kerja, dan proses manajemen suatu instansi akan baik, jika tipe, cara, atau gaya kepemimpinan dan peranan dari pemimpin di terapkan dengan baik.

Tegas baik atau buruknya tercapai atau tidaknya suatu instansi sebagian besar ditentukan oleh kecakapan pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya untuk mengarahkan para bawahannya, karena kecakapan dan kewibawaan seorang pemimpin melaksanakan kepemimpinannya akan mendorong gairah kerja, kreatifitas, partisipasi, dan loyalitas para bawahannya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Adapun definisi kepemimpinan yang dikemukakan beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

Menurut Veitshal Rivai (2012:53) menyatakan bahwa: “Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memancing tumbuhnya perasaan yang positif dalam diri orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan”. Robbins dan Coulter (2012:488) menyampaikan bahwa: *“leadership is what leaders do. It’s proses of leading a group and influencing that group to achieve it’s goals”* “Kepemimpinan adalah apa yang pemimpin lakukan. Itu adalah proses memimpin kelompok dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan”.

Kepemimpinan menurut amirullah (2015:167) adalah orang yang memiliki wewenang untuk memberi tugas, mempunyai kemampuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain dengan melalui pola hubungan yang baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan Definisi- definisi diatas maka, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dan merubah perilaku untuk mencapai tujuan bersama di dalam sebuah organisasi atau kelompok.

b. Teori Kepemimpinan

Teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Veitzhal Rivai, Deddy Mulyadi (2012:7) mengemukakan bahwa teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas (fisik, mental, kepribadian) yang dikaitkan dengan keberhasilan kepemimpinan. Teori mengenai kepemimpinan dapat digolongkan ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu:

1) Pendekatan sifat

Pendekatan ini menekankan pada kualitas pribadi dari para pemimpin. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah dan dianugrahi beberapa ciri yang tidak dimiliki orang lain seperti energi yang tidak berkurang, instuisi yang mendalam, pandangan masa depan yang luar biasa, dan kekuatan persuasif yang tidak tertahankan. Empat sifat umum yang mempengaruhi terhadap keberhasilan kepemimpinan dalam suatu organisasi antara lain (Thoha, 2012):

a) Kecerdasan

Hasil penelitian umumnya membuktikan bahwa pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin. Namun demikian, yang sangat menarik dari penelitian tersebut adalah pemimpin tidak bisa melampaui terlalu banyak dari kecerdasan pengikutnya.

b) Kedewasaan dan Keluasan Hubungan Sosial

Pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil, serta mempunyai perhatian yang luas terhadap aktivitas-aktivitas sosial. Dia mempunyai keinginan menghargai dan dihargai.

c) Motivasi Diri dan Dorongan Berpartisipasi

Para pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berpartisipasi. Mereka bekerja berusaha mendapatkan penghargaan yang intrinsik dibandingkan dari ekstrinsik

d) Sikap-Sikap Hubungan Kemanusiaan

Pemimpin-pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan pengikutnya dan mampu berpihak kepadanya.

2) Pendekatan Kepribadian perilaku

Telaah kepemimpinan yang dilakukan pada pusat riset Universitas Michigan, dengan sasaran melokasikan karakteristik perilaku kepemimpinan yang tampaknya dikaitkan dengan ukuran keefektifan kinerja, mengidentifikasikan terdapat dua gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu:

a) Pemimpin yang berorientasi pada tugas menerapkan pengawasan ketat sehingga bawahan melakukan tugasnya dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan.

b) Pemimpin yang berorientasi pada bawahan mendelegasikan pengambilan keputusan bawahan dan membantu pengikutnya dalam memuaskan kebutuhan nya dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang suportif. Pemimpin yang berpusat pada pegawai memiliki perhatian terhadap kemajuan, pertumbuhan dan prestasi pribadi pengikutnya. Tindakan-tindakan ini diasumsikan dapat memajukan pembentukan dan perkembangan kelompok.

3) Pendekatan kepemimpinan situasional

Suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia.

c. Fungsi dan Peran Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau instansi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan diluar situasi itu. Secara operasional ada lima fungsi pokok kepemimpinan yang dikemukakan oleh Veitzhal Rivai (2012:34), yaitu:

1) Fungsi instruksi

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah, pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah.

2) Fungsi Konsultasi

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya untuk memperoleh berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (*feedback*) untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultatif dapat diharapkan keputusan-keputusan pimpinan, akan mendapat dukungan dan lebih mudah menginstruksikannya, sehingga kepemimpinan berlangsung efektif.

3) Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain serta keikutsertaan pemimpin.

4) Fungsi delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi.

5) Fungsi pengendalian

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

Dalam menjalankan perannya pemimpin mempunyai tugas-tugas tertentu, yaitu mengusahakan agar kelompoknya dapat mencapai tujuan

dengan baik dalam kerja sama yang optimal. Berikut ini peran pemimpin yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno (2014:219) diantaranya :

1) Peran Interpersonal

Peran interpersonal terbagi kedalam 3 peran yaitu :

- a) Peran yang menampakan diri dengan berinteraksi kepada bawahan juga didalam dan diluar organisasi sebagai symbol keberadaan organisasi.
- b) Peran selaku pemimpin yang bertanggung jawab untuk memotivasi dan memberikan arahan kepada para bawahan.
- c) Peran selaku penghubung dimana seorang manajer harus mampu memberikan perhatian khus kepada pegawainya.

2) Peran Informasional

Peran informasional terbagi ke dalam 3 peran yaitu :

- a) Seorang manajer adalah pemantau arus informasi yang terjadi dari luar dan dalam organisasi.
- b) Sebagai pemimbing informasi,
- c) Peran selaku juru bicara organisasi.

3) Peran Pengambil Keputusan

Peran pengambil keputusan terbagi ke dalam 3 peran yaitu :

- a) Sebagai entrepreneur diharapkan mampu mengkaji terus menerus berbagai peluang dari situasi yang dihadapi oleh organisasi.

- b) Sebagai peredam gangguan dengan kesediaan memikul tanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif apabila organisasi mengalami gangguan.
- c) Sebagai pembagi sumber daya manusia dengan wewenangnya untuk menempatkan orang pada posisi tertentu, mempromosikan karyawan yang berprestasi.

d. Tipe Kepemimpinan

Kepemimpinan didalam melaksanakan fungsi-fungsinya, maka akan berlangsung aktivitas kepemimpinan. Apabila aktivitas dapat di capai dan sesuai dengan rencana maka akan terlihat gaya kepemimpinan dengan polannya masing - masing. Vitzhal Rivai (2012:42) mengemukakan gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, yaitu:

- 1) Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas
- 2) Gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerja sama
- 3) Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang dicapai

Berdasarkan ketiga pola dasar tersebut terbentuk perilaku kepemimpinan yang terdiri dari tiga pokok kepemimpinan, yaitu:

- 1) Tipe kepemimpinan otoriter

Tipe kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan dan tugas

anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, perintah dan bahkan kehendak pimpinan. Pimpinan dirinya lebih dalam segala hal, dibandingkan dengan bawahannya. Kemampuan bawahan selalu dipandang rendah sehingga dianggap tidak mampu berbuat sesuatu tanpa diperintah

2) Tipe kepemimpinan kendali bebas

Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok-kelompok kecil. Pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasihat.

3) Tipe kepemimpinan demokratis

Tipe kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok atau organisasi. Pemimpin memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspeknya. Kemauan, kehendak, kemampuan, buah pikiran, pendapat, kreatifitas, inisiatif yang berbeda-beda dan dihargai disalurkan secara wajar. Tipe kepemimpinan ini selalu berusaha untuk memanfaatkan setiap orang yang dipimpin. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kepemimpinan tipe ini dalam

mengambil keputusan sangat mementingkan musyawarah yang diwujudkan pada setiap jenjang dan di dalam unit masing- masing.

e. Dimensi dan Indikator Kepemimpinan

Veitzhal Rivai (2012:53) mengemukakan bahwa seorang pemimpin dalam mengimplementasikan kepemimpinannya harus mampu secara dewasa melaksanakan kedewasaan terhadap instansi atau organisasinya, kepemimpinan dibagi ke dalam lima dimensi dan sembilan indikator, yaitu:

- 1) Kemampuan untuk membina kerjasama dan hubungan yang baik
 - a) Membina kerjasama dan hubungan baik dengan bawahan dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing
 - b) Kemampuan seorang pemimpin dalam memotivasi bawahannya
- 2) Kemampuan yang efektifitas
 - a) Mampu menyelesaikan tugas di luar kemampuan
 - b) menyelesaikan tugas tepat waktu
 - c) Hadir tepat waktu dan tidak terlambat
- 3) Kepemimpinan yang partisipatif
 - a) Pengambilan keputusan secara musyawarah
 - b) Dapat menyelesaikan masalah secara tepat
 - c) Mampu meneliti masalah yang terjadi pada pekerjaan
- 4) Kemampuan dalam mendelegasikan tugas atau waktu
 - a) Bersedia untuk membawa kepentingan pribadi dan organisasi kepada kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan organisasi menggunakan waktu sisa untuk keperluan pribadi
 - b) Mampu dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan target

5) Kemampuan dalam mendelegasikan tugas atau wewenang

- a) Tanggung jawab seorang pemimpin dalam menyelesaikan tugas mana yang harus ditangani sendiri dan mana yang harus ditangani secara kelompok.
- b) Memberikan bimbingan dan pelatihan dalam pengambilan keputusan.

2. Konsep Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berarti hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan keikutsertaan; peran serta. Pengertian sederhana tentang partisipasi dalam hubungannya dengan pembangunan adalah mengambil bagian atau ikut berperan secara aktif dalam semua proses pelaksanaan pembangunan sesuai kemampuan (Sumaryadi, 2010:49).

Partisipasi dapat diartikan sebagian pengikutsertaan/ peran serta” atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama (Sumaryadi: 2010:46). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk Konsep partisipasi itu sendiri telah lama menjadi bahan kajian. Kata “partisipasi” dan “partisipatoris” merupakan dua kata yang sangat sering digunakan dalam bangunan. Keduanya memiliki banyak makna yang berbeda.

Pengertian partisipasi menurut Mikkelson (2011:58), antara lain sebagai berikut.

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- 2) Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk menanggapi proyek- proyek pembangunan.
- 3) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- 4) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak dampak sosial.
- 5) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.”

Sedangkan menurut Uphoff, Kohen, dan Goldsmith (dalam Nasution, 2009:16), partisipasi merupakan istilah deskriptif yang menunjukkan keterlibatan beberapa orang dengan jumlah signifikan dalam berbagai situasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya, yaitu: adanya kemauan, adanya kemampuan dan adanya kesempatan untuk berpartisipasi.

Kemampuan dan kemauan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan. Apabila ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, walaupun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi.

Dari pendapat tersebut, diketahui unsur partisipasi adalah a) harus ada tujuan bersama yang hendak dicapai; b) adanya dorongan untuk menyumbang atau melibatkan diri bagi tercapainya tujuan bersama; c) keterlibatan masyarakat baik secara mental, emosi dan fisik, dan; d) harus adanya tanggung jawab bersamademi tercapainya tujuan kelompok.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, secara lengkap dikemukakan oleh Mubyarto (dalam Sumaryadi, 2010:49). Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut oleh karena itu;

- 1) Kegiatan sasaran pembangunan masyarakat, yaitu perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, pembangkitan partisipasi masyarakat, dan penumbuhan kemampuan masyarakat untuk

berkembang secara mandiri, tidak berdiri sendiri, melainkan diusahakan agar yang satu berkaitan dengan yang lain, sehingga ketiganya dapat dianggap sebagai satu paket usaha.

- 2) Peningkatan taraf hidup masyarakat diusahakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat, dan juga sebagai usaha menggerakkan partisipasi masyarakat.
- 3) Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.
- 4) Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara mandiri terdapat hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi satu mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat yang berkemampuan demikian bisa membangun desanya dengan atau tanpa partisipasi vertikal dengan pihak lain.
- 5) Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat ditumbuhkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desanya.

Partisipasi melibatkan mental dan emosi lebih banyak dari pada fisik seseorang. Partisipasi yang didorong oleh mental dan emosi disebut partisipasi otonom, sedangkan partisipasi didorong dengan paksaan disebut mobilisasi. Partisipasi mendorong seseorang atau kelompok untuk menyumbang atau mendukung kegiatan bersama, berdasarkan kesukarelaan sehingga tumbuh rasa tanggung jawab bersama terhadap kepentingan kelompok atau organisasi.

3. Konsep Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk di dalamnya pembangunan Desa. Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Bagi Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berkualitas berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat Desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup di Desa. Melalui implementasi Undang-undang ini diharapkan pembangunan di pedesaan tidak hanya akan lebih merata tetapi juga lebih partisipatif, sesuai dengan potensi ekonomi dan lebih berkeadilan.

Kehadiran Undang-undang Desa sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan Desa sekaligus cetak biru pembangunan di Desa merupakan catatan bersejarah dalam agenda percepatan pembangunan Nasional. Undang-undang Desa ini juga merupakan momentum percepatan pembangunan di Desa di seluruh wilayah Indonesia. Amanat Undang-undang Desa yang bersifat mandatory menitik beratkan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa, pengelolaan asset dan keuangan Desa, pembangunan kawasan Desa, kewenangan Desa dan perangkat Desa. Undang-undang ini dalam pasal 87 juga memungkinkan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMD) untuk mengoptimalkan potensi dan aktivitas ekonomi pedesaan.

Dengan Undang-undang Desa ini, penyelenggaraan pemerintahan Desa diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan asset, keuangan dan pendapatan Desa. Untuk memberi insentif bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Undang-undang Desa ini memberikan jaminan penghasilan dan sejumlah tunjangan bagi Kepala Kampung yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Beberapa tujuan pemerintahan Desa dalam Undang-undang ini antara lain tertuang dalam pasal 4 yakni : Membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur tentang pengelolaan keuangan dan asset Desa. Pertama, pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan Desa khususnya terkait anggaran dan belanja pemerintahan Desa, maka salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi belanja pusat dengan memanfaatkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan (pasal 72 ayat 2). Selain itu dalam Undang-undang ini juga dialokasikan minimal 10 persen masing-masing dari hasil pajak/retribusi daerah dan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (pasal 72 ayat 3 dan 4).

Kedua, pada pasal 76 dan 77, Desa diberi kewenangan untuk mengelola asset yang berada diwilayahnya dan dicatat sebagai kekayaan Desa. Secara teknis, pengelolaan keuangan dan asset Desa akan dituangkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan saat ini. Pengelolaan keuangan dan asset Desa dalam Undang-undang ini tentunya merupakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Artinya, pemerintahan Desa perlu mempersiapkan diri dan memodernisasi sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Untuk terus meningkatkan kesiapan dan kemampuan perangkat Desa, maka dalam pasal 112 sampai pasal 115 baik pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pendidikan dan penyuluhan serta memberikan pedoman penyusun peraturan dan perencanaan Desa secara partisipatif.

Selain itu juga, evaluasi peraturan Desa dilakukan untuk menjamin kualitas peraturan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-undang Desa merupakan bagian yang terpisahkan dari program pro-rakyat yang selama ini telah dijalankan. Perluasan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat masyarakat Desa diharapkan dapat segera terwujud dari pelaksanaan Undang-undang ini. Memperluas kesejahteraan di tingkat masyarakat Desa secara tidak langsung mempercepat distribusi pembangunan serta mendorong pengentasan kemiskinan secara Nasional. Pelaksanaan Undang-undang Desa tentunya

akan membantu percepatan pembangunan Desa, mendorong sejumlah potensi ekonomi Desa, serta memperkuat sistem ketahanan ekonomi Desa.

Arah pembangunan Nasional ke depan dipastikan akan lebih merata dan berkeadilan, pemerintahan Desa, pembinaan serta pengawasannya. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di pedesaan akan membantu menyelesaikan sejumlah tantangan Nasional seperti pengetasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan serta secara agregat lebih mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu pembangunan Desa mau tidak mau harus dilaksanakan dalam rangka pengetasan kemiskinan masyarakat.

Menurut Siagian (dalam Bratakusumah 2003;4) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pembangunan masyarakat Desa adalah meninggikan taraf penghidupan masyarakat desa dengan jalan melaksanakan pembangunan yang integral dari masyarakat desa, berdasarkan asas kekuatan sendiri serta asas pemufakatan bersama antara anggota-anggota masyarakat desa dengan bimbingan serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan dalam rangka kebijaksanaan umum yang sama.

Pembangunan desa ditunjukkan untuk segenap masyarakat, dengan demikian pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat desa. Pembangunan desa bukanlah terfokus dalam satu bidang saja, akan tetapi harus seimbang, serasi dan mencakup segala bidang. Jelasnya dikatakan bahwa keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong (Keppres No.21/1989 : 26 Tentang Pembangunan Masyarakat Desa).

Dari beberapa pendekatan atas pelaksanaan pembangunan desa dapat dikemukakan :

- a. Pembangunan desa yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah suatu pembangunan akan langsung menyentuh kebutuhan sebagian besar rakyat Indonesia, dimana lebih dari 80% penduduk bermukim di pedesaan.
- b. Pembangunan desa mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat desa, dan terdiri atas sektor dan program yang saling berkaitan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah melalui berbagai departemen dan non tanggung jawab masing-masing.
- c. Pembangunan desa mempunyai makna yang lebih hakiki bagi masyarakat Indonesia karena dalam realisasi fisiknya justru bersifat menyeluruh dan menyebar luas keseluruh pelosok pedesaan serta dengan

menggali segala potensi dengan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mendukungnya.

- d. Pembangunan desa mempunyai arti yang sangat strategis dalam rangka pembangunan Nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ini dapat diartikan sebagai titik sentral dari pembangunan Nasional, karena pembangunan desa merupakan pembangunan yang langsung bersangkutan dengan masyarakat yang berada di pedesaan. Semua jenis pembangunan, baik pembangunan sektoral, pembangunan regional maupun pembangunan khusus (inpres), semuanya diarahkan kepedesaan.
- e. Pada akhirnya pembangunan desa tidak mungkin hanya dilakukan oleh sepihak saja tanpa koordinasi dan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah sampai pemerintah desa. Dari sini pulalah perlu inisiatif bahwa, beban dan tanggung jawab pembangunan bukanlah tugas ringan, justru berhasil tidaknya pembangunan desa akan berakibat langsung kepada kehidupan dan penghidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan melihat pendekatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh warga desa maka pembangunan desa dapat dilihat sebagai proses dan metode. Dikatakan sebagai proses karena memperlihatkan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara yang tradisional kearah yang lebih maju dan lebih menekankan kepada aspek perubahan yang terjadi pada masyarakat, baik yang menyangkut

aspek sosial maupun aspek psikologisnya, dan sebagai metoda berarti bahwa pembangunan desa akan mengusahakan agar masyarakat berkemampuan dan sumber-sumber yang mereka miliki.

Untuk mengadakan perubahan sosial budaya masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban seluruh aparat pemerintah dan masyarakat sendiri untuk menciptakan dan memperluas serta melaksanakan program-program pembangunan Nasional yang diselenggarakan termasuk penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa dan kelurahan. Dengan demikian maka harus mutlak melaksanakan administrasi pemerintahan dalam menunjang keberhasilan Pembangunan Desa dan Kelurahan.

Pembangunan desa diusahakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat desa yang meliputi peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi Desa, dan pengembangan Lembaga Keuangan Desa serta ketertiban dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kemampuan dan kesanggupan masyarakat menaikkan hasil produksinya.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan

(Musrenbang). Musrenbang merupakan wahana utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan Nasional dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme''bottom-up planning'', dimulai dari Musrenbang

Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Musrenbang Kabupaten/ Kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil Musrenbang Kabupaten / Kota juga digunakan untuk Musrenbang Provinsi, Rakorpus (Rapat Koordinasi Pusat) dan Musrenbang Nasional. Proses Musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan di tingkat desa dilanjutkan di tingkat Kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritasasi program/kegiatan ditingkat Kabupaten / Kota oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah. Pada tingkat Desa, fungsi Musrenbang adalah menyepakati isu prioritas wilayah desa, program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), diusulkan ke APBD, maupun yang akan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dan APBDesa, serta menetapkan wakil/ delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.

4. Kerangka Pikir

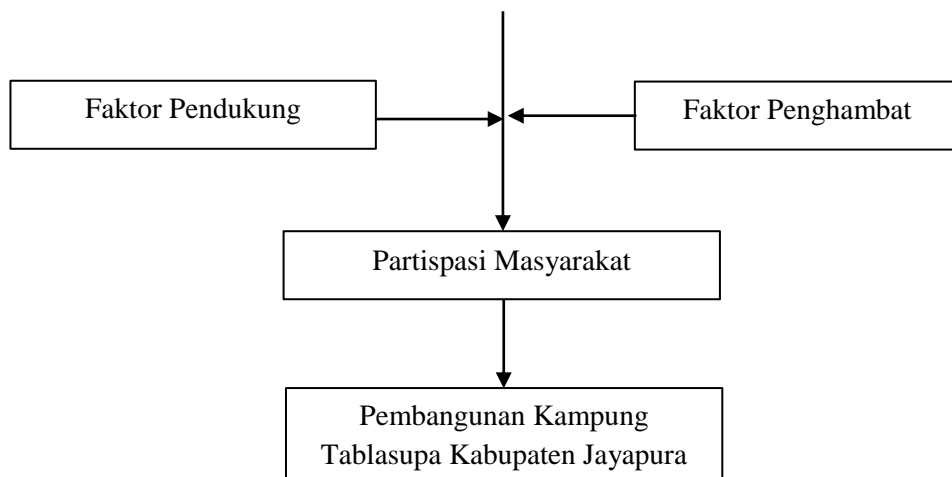
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan desa. Menurut Veitzhal Rivai (2012:53) kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memancing tumbuhnya perasaan yang positif dalam diri orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Keith Devis merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, antara lain :1) Kecerdasan, 2). Kedewasaan dan Keluasan hubungan sosial, 3) Motivasi diri dan Dorongan berprestasi dan 4) Sikap hubungan Kemanusiaan.

Menurut Mardikanto dkk (2013:81) partisipasi merupakan keikutsertaan dan keterlibatan seseorang atau sekelompok masyarakat secara aktif dalam suatu kegiatan, selanjutnya Yadav dalam Mardikanto dkk (2013:82) mengemukakan ada empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat didalam kegiatan pembangunan, yaitu: 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, 3) Sumbangan dana dalam swadaya masyarakat dan 4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

Partispasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisis oleh badan yang berwenang.

Berdasarkan uraian diatas maka berikut adalah bagan kerangka konsep penelitian:



Gambar 2.1. Kerangka Konsep
Sumber : Veitzhal Rivai, Deddy Mulyadi (2012:7)

5. Operasional Konsep

Konsep adalah unsur penelitian yang sangat penting dan merupakan definisi yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak dari suatu fenomena alam. Konsep merupakan generalisasi dari kelompok fenomena

a. Kepemimpinan

Kemampuan Kepala Kampung dalam mempengaruhi masyarakat dengan cara memancing tumbuhnya perasaan yang positif dalam diri orang-orang yang dipimpinya untuk mencapai tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

b. Partisipasi Masyarakat

Peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan desa.

c. Pembangunan

Penyelenggaraan pemerintahan Desa berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat Desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup di Desa.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe survey penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang bagaimana kepemimpinan Kepala Kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kampung Tablasupa Kabupaten Jayapura.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kampung Tablasupa Kabupaten Jayapura.

3. Informan

Informan atau narasumber dalam penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi maupun data yang banyak terkait masalah dan objek yang sedang diteliti sehingga nantinya akan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut (Sugiyono, 2019;90).

Adapun yang menjadi informan sebanyak 4 orang dalam penelitian ini meliputi

1. Kepala Kampung : Bpk. Maurits Serontou
2. Serektaris Kepala Kampung: Bpk. Andris Yakoseray
3. Kaur Keuangan Kampung: Bpk. Hans Yoku
4. Ketua BPD: Bpk. Hendrikus Okoseray

Penelitian yang membahas kepemimpinan kepala kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kampung Tablasupa Kabupaten Jayapura.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang berkaitan dengan penelitian dan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Pengaruh Kepala Kampung terhadap pelaksanaan pembangunan dan ini berupa tanggapan responden hasil wawancara .
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung, buku-buku bacaan, tokoh masyarakat, dan Undang-undang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data-data di atas dikumpul dengan cara :

a. Teknik Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti berupa wawancara bebas dan terpimpin terhadap narasumber. Dalam pelaksanaannya, penulis membawa pedoman wawancara yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan masalah penelitian. Dengan wawancara tersebut diharapkan menghasilkan jawaban mendalam tentunya menambahkan hal-hal yang belum terlukiskan dalam penelitian ini. Selanjutnya hasil wawancara akan dijadikan data dan dituangkan kedalam pembahasan hasil penelitian.

b. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dan segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2019 : 243) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan simpulan.

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Hardani, 2020). Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Pada dasarnya dalam reduksi data ini peneliti berusaha menemukan data yang valid, sehingga ketika peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh dapat dilakukan pengecekan ulang dengan informasi yang lain dari sumber yang berbeda.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman dalam (Hardani, 2020), sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Tujuan dalam melakukan display data atau menyajikan data ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data.

Melalui pemahaman terhadap sajian data ini, peneliti dapat melakukan analisis data untuk dapat merumuskan temuan-temuan dalam penelitian dan mengemukakan simpulan akhir penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2019 : 243) adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam pembuatan simpulan proses analisis data ini dilanjutkan dengan mencari hubungan antara apa yang dilakukan (*what*), bagaimana melakukan (*how*), mengapa dilakukan seperti itu (*why*) dan bagaimana hasilnya (*how is the effect*). Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data yang terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan.